

## Inovasi Perencanaan Anggaran Belanja Kegiatan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

Ahmad Nurrafi' Arfitsani <sup>1\*</sup>, Ananta Prathama <sup>2</sup>

Prodi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email: [ahmadnurrafi4@gmail.com](mailto:ahmadnurrafi4@gmail.com) [prathama.ananta@gmail.com](mailto:prathama.ananta@gmail.com)

**Abstract** This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) for budget planning of activity expenditures at Bakesbangpol Sidoarjo. SIPD, an integrated system, aims to enhance the effectiveness and efficiency of planning and budgeting in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019. Using a qualitative approach with observations, interviews, and document studies, the research reveals that SIPD offers advantages such as data synchronization between central and local governments, despite challenges like limited human resources and technical server issues. The implementation of SIPD in Bakesbangpol Sidoarjo requires adaptation and capacity-building to optimize the system. This study concludes by emphasizing the importance of technology-based innovation management in achieving transparency and accountability in regional budget planning.

**Keywords** : Regional Government Information System; Budget Planning; Bakesbangpol; Technology-based Innovation

**Abstrak** Penelitian ini membahas penerapan inovasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan anggaran belanja kegiatan di Bakesbangpol Sidoarjo. SIPD hadir sebagai sistem terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memberikan keunggulan berupa sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, meski terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM dan kendala teknis server. Implementasi SIPD di Bakesbangpol Sidoarjo memerlukan adaptasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung optimalisasi sistem. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan inovasi berbasis teknologi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran daerah.

**Katakunci:** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Perencanaan Anggaran Belanja; Bakesbangpol; Inovasi Berbasis Teknologi

### 1. PENDAHULUAN

Di era transformasi digital seperti sekarang ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat sehingga dapat menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi ini diharapkan dapat membuat seseorang lebih produktif sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam sektor pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih efektif untuk pembuat kebijakan publik dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti yang ada sehingga memberikan dampak positif pada perencanaan dan evaluasi program pemerintah (Hanasi, 2024). Dalam hal ini, perencanaan yang matang akan berkontribusi positif terhadap

pembangunan daerah yang berjalan lancar, teratur, dan terkoordinasi sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

Proses perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan menggunakan teknologi informasi diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membawa kebermanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan penerapan *e-government* yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan untuk membangun jaringan komunikasi yang menghubungkan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, yang berperan dalam memfasilitasi interaksi, transaksi, serta pelayanan. Dengan diberlakukan peraturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut, telah mendorong adanya inovasi produk kebijakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi di setiap urusan pemerintahan. Inovasi tersebut diharapkan dapat memberi ruang kepada pemerintah untuk menciptakan kebaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Thahir, 2019).

Salah satu produk inovasi dalam hal perencanaan pembangunan daerah yaitu diluncurkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap daerah dapat melakukan proses perencanaan anggaran suatu program yang mendorong kemajuan pembangunan daerahnya sesuai dengan lingkup organisasi atau instansinya masing-masing. SIPD resmi diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, sebagai suatu sistem yang terintegrasi mencakup informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah lainnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, SIPD kini menjadi sistem atau aplikasi umum yang wajib diterapkan OPD di seluruh daerah. Optimalisasi SIPD yang menjadi pendorong pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan yang berintegritas dan profesional telah diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo. Berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mendukung optimalisasi sistem tersebut, termasuk dalam OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo (Bakesbangpol Sidoarjo).

Bakesbangpol Sidoarjo sebagai badan pelaksana kebijakan yang meliputi pengondisian ideologi Pancasila, pemahaman kebangsaan, politik nasional, praktik demokrasi, stabilitas ekonomi, sosiokultural, keharmonisan antarsuku, agama, ras, dan golongan, pemberdayaan kelompok masyarakat, serta kesiapsiagaan nasional dan manajemen konflik sosial, seringkali mengadakan kegiatan di bidang tersebut dalam bentuk sosialisasi

maupun FGD. Dalam mewujudkan keberhasilan berbagai kegiatan tersebut tentunya diperlukan perencanaan anggaran belanja kegiatan yang matang. Meskipun hadirnya SIPD mampu memudahkan koordinasi terkait rencana anggaran kegiatan dengan setiap bidang di Bakesbangpol Sidoarjo, namun masih dihadapkan beberapa tantangan mulai dari *server* SIPD yang *down* saat terjadi penyesuaian pagu hingga keterbatasan SDM di bidang perencanaan.

Hambatan dan tantangan serupa juga telah dikaji di dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Tumija & Erlambang, 2023) berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan”, menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran daerah Kabupaten OKU melalui SIPD termasuk dalam kategori baik dan sudah terlaksana 100% dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih terdapat hambatan di dalamnya seperti kurangnya SDM yang menguasai SIPD, *server* SIPD yang sering *down* dan kurang fleksibel, lemahnya koordinasi baik dengan OPD lainnya maupun dengan pemerintah pusat, tidak adanya SOP, dan biaya yang terlalu fokus pada sarana dan prasarana. Kemudian penelitian lain yang dilakukan (Kumalasari & Fanida, 2024) berjudul “Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi pada Efektivitas Penggunaan Platform SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta)”, menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD di DPMPTSP Kota Yogyakarta telah cukup berjalan efektif, namun masih terdapat hambatan seperti kesalahan/error saat proses penganggaran, kinerja *server* SIPD yang belum optimal, dan respon oleh sistem masih belum memenuhi kepuasan penggunanya. Dalam hal ini, penelitian ini menjadi menarik untuk diangkat dikarenakan adanya inovasi SIPD ini seharusnya menjadi sistem informasi terintegrasi yang mendukung efektivitas perencanaan anggaran, namun pada implementasinya masih menyimpan beberapa hambatan yang harus dihadapi seperti yang ada pada kedua penelitian terdahulu tersebut.

Mengacu pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan inovasi perencanaan anggaran belanja kegiatan di Bakesbangpol Sidoarjo melalui SIPD. Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan inovasi perencanaan anggaran belanja kegiatan di Bakesbangpol Sidoarjo melalui SIPD ini dengan harapan anggaran tersebut dapat terealisasi secara optimal. Sehingga untuk menganalisisnya, penulis perlu menyertakan beberapa kajian pustaka berikut sebagai landasan penulisan penelitian ini.

## **Inovasi**

Menurut Rogers (Muntaha & Amin, 2023), inovasi didefinisikan sebagai sebuah ide, gagasan, atau praktik baru yang diharapkan dapat menjadi perubahan bagi kelompok tertentu yang menjadi sasaran. Dengan adanya dukungan ide, produk baru, dan hal lainnya, inovasi yang berkualitas dapat mendukung manajemen mencapai kinerja yang optimal sehingga organisasi dapat terus berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut (Wahyudi, 2019).

Adapun inovasi juga dapat dijelaskan sebagai hasil dari prosedur yang dilakukan dalam mengembangkan pengetahuan serta keterampilan (termasuk teknologi) dan pengalaman untuk menghasilkan atau meningkatkan produk yang mengandung nilai tambah yang lebih berharga (Hutagalung & Hermawan, 2018).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi adalah ide, gagasan, atau praktik baru yang berasal dari hasil pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang didukung penggunaan teknologi sehingga diharapkan dapat membawa perubahan positif pada sasaran tertentu, sekaligus meningkatkan kinerja manajemen demi keberlanjutan jalannya organisasi.

## **Perencanaan Anggaran**

Definisi perencanaan menurut Alder & Rustiadi (Sasoko, 2022), diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai di masa mendatang serta menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

Kemudian menurut Widodo (Sugiarto & Mutiarin, 2017), perencanaan merupakan proses yang dilakukan oleh institusi publik dalam menentukan arah kebijakan suatu wilayah baik di lingkup nasional maupun lokal dengan memperhatikan sumber daya dan tantangan yang ada dalam wilayah tersebut.

Adapun menurut (Inzany et al., 2022), perkembangan di setiap bidang yang menunjukkan adanya kemajuan sangat berhubungan dengan aspek perencanaan yang terorganisir, ditambah lagi adanya kolaborasi dengan pengelolaan keuangan atau penganggaran yang baik. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang matang menjadi pondasi penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan atau program pemerintah.

## **Inovasi Perencanaan Anggaran**

Inovasi memberikan ruang kepada pemerintah daerah agar dapat lebih fleksibel dalam tata kelola dan perencanaan untuk menentukan kegiatan yang terarah dalam rangka mencapai tujuan negara dan otonomi melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Resen, 2015). Inovasi dengan menggunakan teknologi menjadi upaya untuk menciptakan

penganggaran yang efisien dengan penyederhanaan proses yang kompleks, meningkatkan transparansi anggaran, serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk memonitoring dan mengelola alokasi anggaran secara langsung melalui sistem informasi yang terintegrasi (Matondang et al., 2024).

Adapun pemikiran Rogers (Suwarno, 2008), inovasi dalam implementasinya terdiri dari lima karakteristik atau atribut berikut ini:

1) *Relative Advantage* (Keuntungan relatif)

Inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya, di mana keunggulan tersebut menjadi ciri khas yang membedakannya dari inovasi lainnya.

2) *Compatibility* (Kesesuaian)

Inovasi harus kompatibel dengan inovasi sebelumnya, dikarenakan agar inovasi sebelumnya tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Hal ini juga memperhatikan faktor biaya dan perannya dalam proses perubahan menuju inovasi terbaru. Kesesuaian ini memudahkan proses penyesuaian dan pembelajaran atas inovasi tersebut.

3) *Complexity* (Kerumitan)

Inovasi yang terbaru seringkali memiliki tingkat kerumitan yang kompleks dibandingkan inovasi sebelumnya. Meskipun begitu, karena inovasi memberikan cara yang lebih efektif dan efisien, kerumitan ini seringkali tidak menjadi tantangan yang signifikan.

4) *Triability* (Kemungkinan dicoba)

Inovasi dapat diterima jika telah melewati pengujian dan benar-benar memiliki kelebihan dibandingkan inovasi sebelumnya. Oleh karena itu, inovasi tersebut perlu melalui uji publik yang di mana para pemangku kepentingan berkesempatan untuk mengukur kualitas inovasi tersebut.

5) *Observability* (Kemudahan diamati)

Inovasi harus dapat diamati secara jelas, mulai dari langkah kerjanya hingga *output* yang dihasilkannya sehingga manfaatnya dapat dilihat secara langsung.

## **SIPD**

SIPD menjadi suatu aplikasi pengelolaan data informasi mengenai pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah lainnya yang terintegrasi, sebagai dasar melaksanakan pembangunan daerah sehingga diharapkan menghasilkan *output* yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Inzany et al., 2022).

Menurut Indrawan (Inzany et al., 2022), kehadiran SIPD dengan tata kelola yang sistematis dapat mempermudah upaya pencegahan dari ancaman non-konvensional, termasuk

dalam konteks *human security*, yang mana manipulasi data perencanaan dan penganggaran keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah dikategorikan sebagai ancaman nirmiliter.

Adapun menurut (Sudianing & Saputra, 2019), kehadiran SIPD didasarkan pada aspek-aspek baik dari segi teknis maupun non-teknis yang ada pada suatu instansi pemerintah. Aspek-aspek tersebut diantaranya:

1) Aspek Fundamental

SIPD didasarkan pada kepentingan masyarakat atas terwujudnya transparansi informasi, *good governance*, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses ini dimulai dengan membangun suprastruktur yang mencakup kepemimpinan, regulasi, dan pemenuhan sumber daya manusia. Kemudian, dilakukan pengelolaan dan pengendalian manajerial dalam pengembangan dan pelaksanaan SIPD yang didukung bidang kerja terkait.

2) Aspek Teknis

Apabila landasan fundamental sudah terbangun, selanjutnya adalah membangun kerangka teknis SIPD meliputi infrastruktur jaringan informasi, arsitektur aplikasi, dan data antar sistem pendukung SIPD yang menghubungkan proses informasi dari pusat ke daerah.

3) Aspek Pendukung

Aspek terakhir yaitu pendukung SIPD yang mencakup prosedur integrasi data dengan sistem informasi terkait dan pengelolaan sekaligus pengendalian SIPD oleh bidang kerja untuk mendukung operasional sehingga sistem yang terintegrasi dapat berjalan efektif dan efisien.

## 2. METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara, serta melalui studi pustaka yaitu mengkaji dokumen yang sudah ada atau sudah diteliti oleh sumber yang relevan berupa berita, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan buku.

Adapun terdapat tiga orang informan yaitu ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan perencanaan anggaran kegiatan badan. Informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap memiliki pemahaman terkait permasalahan yang diangkat (Sugiyono, 2013).

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif sesuai yang diperkenalkan oleh (Miles et al., 2014) yang mencakup beberapa langkah analisis yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

(Sudianing & Saputra, 2019) menjabarkan ruang lingkup layanan yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 terkait SIPD, sebagai berikut:

#### **1) Informasi Pembangunan Daerah**

SIPD berperan dalam hal pengelolaan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Lebih lanjutnya, SIPD mendukung penyusunan dokumen perencanaan seperti Renja PD, Renstra PD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Melalui SIPD, pengaksesan analisis dan profil pembangunan daerah menjadi mudah dan mendukung pembaruan data informasi perencanaan pembangunan yang meliputi kependudukan, keadaan geografi, perekonomian, sumber daya, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing suatu daerah.

#### **2) Informasi Keuangan Daerah**

SIPD berperan untuk mengelola informasi keuangan daerah yang kolaboratif dengan para pemangku kepentingan dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Proses pengelolaan keuangan daerah dalam SIPD yaitu mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan, akuntabilitas pelaksanaan keuangan dan barang milik daerah, serta pengelolaan informasi keuangan daerah lainnya.

#### **3) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya**

SIPD berperan menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang berisi kinerja pemerintahan dalam periode satu tahun, Peraturan Daerah (Perda), dan informasi lain yang diproses secara kolaboratif antar pemangku kepentingan terkait. Hal ini tentunya bertujuan meningkatkan transparansi data pemerintahan sehingga mempermudah monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Menurut Rogers (Suwarno, 2008), secara umum suatu inovasi memiliki lima karakteristik atau atribut inovasi. Lebih lanjutnya berdasarkan atribut tersebut, akan dianalisis inovasi SIPD sebagai sistem perencanaan anggaran belanja kegiatan di instansi Bakesbangpol Sidoarjo sebagai berikut:

### ***Relative Advantage (Keuntungan relatif)***

Suatu inovasi selayaknya mengandung kelebihan nilai apabila dibandingkan inovasi yang sebelumnya sehingga dapat menciptakan ciri khas yang membedakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah inovasi perlu meningkatkan nilai dibandingkan dengan inovasi yang sudah ada, sehingga dapat menghasilkan keunikan atau ciri khas yang membedakannya dari inovasi lain atau inovasi sebelumnya.

Berdasarkan pada temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, perencanaan anggaran belanja kegiatan di Bakesbangpol Sidoarjo melalui SIPD lebih sistematis dan telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berisi terkait pengelompokan, penyusunan kode, dan penamaan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Apabila dibandingkan dengan sebelum adanya SIPD, perencanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan aplikasi SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo) dan juga aplikasi RDS (*Regional Development System*). Sebenarnya kedua aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di lingkup Pemkab Sidoarjo. Namun dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan penggunaan SIPD maka integrasi yang sebelumnya sudah terbangun tidak dapat dilanjutkan kembali. Hal ini dikarenakan basis data aplikasi SIPD berada di Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri.

Dengan demikian, kelebihan dari hadirnya SIPD ini adalah terdapat pada sistemnya yang sudah terintegrasi secara nasional. Sehingga dapat memudahkan adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perencanaan anggaran daerah.

### ***Compatibility (Kesesuaian)***

Suatu inovasi tidak semata-mata menghilangkan inovasi yang sebelumnya begitu saja, tetapi kesesuaian di antaranya juga harus diperhatikan agar memudahkan proses perubahan ke inovasi yang baru dilihat dari sisi fungsi dan biaya. Hal ini menekankan bahwa sebuah inovasi tidak hanya langsung menggantikan inovasi yang ada sebelumnya, tetapi juga harus memperhatikan keselarasan antara keduanya agar proses peralihan menuju inovasi baru dapat berjalan dengan baik, baik dalam aspek fungsi maupun efisiensi biaya.

Berdasarkan pada temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, perencanaan anggaran belanja kegiatan di Bakesbangpol Sidoarjo sebelum adanya SIPD, menggunakan aplikasi lokal dalam lingkup Pemkab Sidoarjo yaitu SIKSDA dan RDS yang memang belum



menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahan-perubahan di dalamnya. Sehingga kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi di dalam Satu Data Indonesia (SDI) yang mengelola satu kesatuan data yang berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan hadirnya SIPD, maka kegiatan perencanaan anggaran Bakesbangpol Sidoarjo harus dapat beradaptasi dari aplikasi-aplikasi sebelumnya ke aplikasi SIPD. Dalam proses adaptasi tersebut pegawai pengelola perencanaan perlu untuk memahami operasional penggunaan SIPD. Meskipun secara alur kerjanya sebagian besar hampir serupa, namun yang membedakan adalah hanya pada nomenklatur, kode rekening, dan program atau kegiatan.

### ***Complexity (Kerumitan)***

Suatu inovasi bagaimanapun harus mengesampingkan kerumitan penggunaan yang lebih kompleks, dengan mendapatkan keuntungan proses yang lebih efektif dan efisien. Hal ini menegaskan bahwa fokus yang dilihat dalam inovasi adalah cara kerjanya yang menghasilkan *output* lebih efektif dan efisien tanpa menghiraukan segala kerumitan baru yang dihadapi karena seiring berjalannya waktu pengguna akan merasa terbiasa dengan inovasi tersebut.

Berdasarkan pada temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kerumitan atau hambatan yang dihadapi dalam perencanaan anggaran melalui SIPD adalah adanya sistem buka-tutup *server* dan penjadwalan yang dilakukan secara terpusat. Hal ini tentunya menjadi tidak fleksibel apabila terdapat keperluan untuk menyesuaikan perubahan angka dan kode rekening anggaran.

Oleh karena itu, sudah seharusnya penjadwalan tidak dilakukan secara terpusat, tetapi diberlakukan penjadwalan yang terpublikasi dari admin daerah. Dengan begitu, setiap OPD yang ada di lingkup Pemkab Sidoarjo mempunyai jadwalnya masing-masing secara terstruktur pada waktu penyusunan dokumen perencanaan baik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rencana Kerja (Renja), serta perubahannya melalui evaluasi di tingkat provinsi.

### ***Triability (Kemungkinan dicoba)***

Suatu inovasi harus mempunyai kualitas yang lebih baik jika dibanding dengan inovasi sebelumnya melalui tahapan pengujian oleh pemangku kepentingan terkait. Hal ini menjadi sangat penting agar saat inovasi tersebut diterapkan, diharapkan dapat memenuhi ekspektasi penggunaannya dan menghasilkan *output* atau hasil yang optimal.

Berdasarkan pada temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, proses uji coba SIPD pernah diadakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Kemendagri pada tahun 2020. Hal tersebut dimaksudkan agar para admin setiap OPD dapat terbiasa dan menyesuaikan diri dalam mengoperasikan aplikasi SIPD tersebut.

Bimbingan teknis terkait penerapan SIPD juga telah dilakukan pada 21-23 November 2024 oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan transparan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh bendahara dan staf admin dari OPD yang ada di lingkup Pemkab Sidoarjo dan diakhiri dengan simulasi serta diskusi untuk memastikan pemahaman yang aplikatif. Diharapkan dengan bimbingan teknis ini, pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di Kabupaten Sidoarjo dapat lebih profesional dan berintegritas (BPKAD Sidoarjo, 2024).

Dengan demikian, melalui uji coba tersebut, admin atau pegawai pengelola perencanaan OPD Bakesbangpol Sidoarjo telah berhasil memahami secara mendalam terkait bagaimana langkah penggunaan SIPD mulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), hingga ke tahap penganggaran.

#### ***Observability* (Kemudahan diamati)**

Suatu inovasi harus dapat diamati dengan jelas, baik pada kerangka kerjanya maupun *output* yang dihasilkannya. Hal ini diperlukan agar kebermanfaatannya dari inovasi tersebut dapat terlihat secara langsung dan kualitas kinerjanya dapat diukur dengan baik.

Berdasarkan pada temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, perencanaan anggaran belanja kegiatan di Bakesbangpol Sidoarjo sudah berjalan efektif karena didasarkan pada peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yang mewajibkan penggunaan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, SIPD juga memuat indikator kinerja kegiatan yang diampu oleh individu pegawai sehingga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pegawai.

Adapun hasil atau *output* dari perencanaan anggaran melalui SIPD adalah dalam bentuk *print layout* Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Nantinya data anggaran dalam SIPD Perencanaan tersebut dapat secara langsung dipergunakan untuk proses pengeluaran belanja OPD Bakesbangpol Sidoarjo melalui SIPD Penatausahaan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai bidang yang dapat memberi kebermanfaatannya bagi masyarakat umum.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hasil dan pembahasan penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi perencanaan anggaran belanja kegiatan di Bakesbangpol Sidoarjo melalui SIPD sudah terimplementasi dengan baik dengan integrasi informasi data yang berskala nasional. Namun memang masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Salah satu hambatannya adalah adanya penjadwalan tertentu dengan sistem kunci *server* yang dilakukan secara terpusat sehingga apabila ada perubahan angka anggaran, maka tidak bisa disesuaikan secara fleksibel. Dengan demikian, penulis melalui penelitian ini ingin memberikan saran kepada para pemangku kepentingan terkait agar mekanisme penjadwalan akses SIPD setiap OPD dilakukan melalui admin daerahnya masing-masing sehingga diharapkan dapat meminimalisir penuhnya *server* SIPD pada waktu penyusunan perencanaan anggaran dan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- BPKAD Sidoarjo. (2024). *BPKAD Kabupaten Sidoarjo sukses gelar bimbingan teknis SIPD-RI selama tiga hari*. Diakses dari <https://bpkad.sidoarjokab.go.id/web/?p=19345>
- Hanasi, R. A. (2024). Peran teknologi informasi dalam modernisasi administrasi publik. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 2(1), 64–70.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun inovasi pemerintah daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem informasi pemerintahan daerah dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573–3588.
- Kumalasari, N. I., & Fanida, E. H. (2024). Peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui sistem informasi pemerintahan daerah (Studi pada efektivitas penggunaan platform SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta). *Publika*, 12(2), 381–394.
- Matondang, K. A., Ujung, S., Annuradi, M. A. S., & Situmorang, E. A. A. (2024). Mengoptimalkan efisiensi anggaran birokrasi: Tantangan dan solusi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 2380–2390.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Muntaha, N. G., & Amin, A. (2023). Difusi inovasi, diseminasi inovasi, serta elemen difusi inovasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2548–2554.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Resen, M. G. S. K. (2015). Inovasi daerah (Refleksi dan pengaturan inovasi daerah di Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(4), 680–687.
- Sasoko, D. M. (2022). Pentingnya perencanaan dalam upaya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 83–89.
- Sudianing, N. K., & Saputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 112–133.
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1–38.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*. Jakarta: STIA LAN.
- Thahir, B. (2019). Paradigma dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(1), 175–186.
- Tumija, & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2), 155–169.
- Wahyudi, S. (2019). Teori inovasi: Sebuah tinjauan pustaka. *Jurnal Valuta*, 5(2), 93–101.